Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8601 – 8607 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PENGARUH PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA: BUKTI PANEL PROVINSI, 2021–2025

Sumia Syam[1], Sri Kurniawati[2]
Universitas Tanjungpura, Pontianak
e-mail: [1] b2052251052@student.untan.ac.id, [2] sri.kurniawati@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak: Perbankan syariah diharapkan mendukung ekosistem industri halal Indonesia dengan menyalurkan dana ke kegiatan produktif, tetapi bukti mengenai kontribusinya terhadap pertumbuhan regional masih beragam. Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di 33 provinsi di Indonesia selama 2021–2025 (165 observasi), menggunakan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* diestimasi dan dibandingkan dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, kemudian dilanjutkan dengan uji diagnostik dan uji ketahanan hasil. Total pembiayaan tumbuh sekitar 12 persen per tahun, tetapi tetap sangat terkonsentrasi, dengan DKI Jakarta menguasai lebih dari sepertiga total. Hasil uji memilih model *fixed effect*, dengan koefisien log pembiayaan yang positif ($\beta = 1{,}454$; $p = 0{,}038$). Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan dengan *standard error cluster-robust* ($p = 0{,}073$) dan hilang setelah efek tahun ditambahkan untuk mengendalikan pemulihan pascapandemi yang dialami bersama ($\beta = -0{,}579$; $p = 0{,}261$), yang menurut uji Pesaran bersifat kuat. Pembiayaan dengan lag dan pertumbuhan pembiayaan juga tidak menunjukkan pengaruh positif. Dengan demikian, hipotesis adanya pengaruh positif dan signifikan tidak didukung dalam periode yang singkat. Bank syariah perlu mengalihkan pembiayaan ke sektor produktif dan wilayah di luar Jawa untuk memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: data panel; ekosistem industri halal; Indonesia; pembiayaan bank syariah; pertumbuhan ekonomi.

Abstract: *Islamic banking is expected to support Indonesia's halal industry ecosystem by channeling funds into productive activities; however, evidence regarding its contribution to regional growth remains mixed. This study analyzes the impact of financing provided by Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units on economic growth across 33 Indonesian provinces from 2021 to 2025 (165 observations), utilizing data from the Financial Services Authority (OJK) and Statistics Indonesia (BPS). Common effect, fixed effect, and random effect models were estimated and compared using the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, followed by diagnostic and robustness checks. Total financing grew by approximately 12 percent annually but remained highly concentrated, with DKI Jakarta accounting for more than one-third of the total. The fixed-effect model was selected, yielding a positive coefficient for the log of financing ($\beta = 1.454$; $p = 0.038$). However, this effect was not statistically significant when using cluster-robust standard errors ($p = 0.073$) and disappeared entirely once year effects were included to control for the shared post-pandemic recovery ($\beta = -0.579$; $p = 0.261$)—a result confirmed as robust by the Pesaran test. Neither lagged financing nor financing growth showed a positive impact. Consequently, the hypothesis that Islamic banking exerts a positive and significant influence is not supported for this short period. Islamic banks need to shift their financing toward productive sectors and regions outside of Java to strengthen their contribution to regional economic growth.*

Keywords: *panel data; halal industry ecosystem; Indonesia; Islamic bank financing;*

economic growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dari waktu ke waktu, dan sektor keuangan merupakan salah satu saluran yang memperluas kapasitas tersebut. Dengan menghimpun tabungan, mengalokasikan dana ke penggunaan produktif, memantau debitur, dan berbagi risiko, lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan investasi dan produktivitas (Levine, 1997). Bukti lintas negara telah lama mengaitkan perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan yang lebih cepat (King & Levine, 1993), meskipun hubungan tersebut melemah atau bahkan berbalik ketika kredit tumbuh melampaui kebutuhan produktif (Arcand et al., 2015; Rousseau & Wachtel, 2011).

Perbankan syariah memiliki posisi khusus dalam perdebatan ini. Karena pembiayaan syariah harus terkait dengan transaksi riil, seperti jual beli, sewa, atau kemitraan bagi hasil, pembiayaan ini diharapkan memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, bank syariah juga merupakan bagian dari ekosistem industri halal yang lebih luas, bersama dengan sertifikasi halal dan ekspor halal, melalui penyediaan modal kerja dan dana investasi bagi produsen halal. Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) bank konvensional meningkat dari Rp409.246 miliar pada 2021 menjadi Rp670.318 miliar pada 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), tetapi pertumbuhan tahunannya melambat dari 19,7 persen pada 2022 menjadi 7,6 persen pada 2025, dan DKI Jakarta sendiri menyumbang 36,3 persen dari total pembiayaan tahun 2025.

Bukti empiris mengenai apakah pembiayaan syariah mendorong pertumbuhan masih beragam. Di 52 negara, perbankan syariah berhubungan positif dengan pertumbuhan, terutama melalui akumulasi modal dan inklusi keuangan (Imam & Kpodar, 2016). Di Indonesia, pembiayaan syariah menunjukkan hubungan jangka panjang yang positif dengan output nasional (Zahirah et al., 2025), dan di 33 provinsi selama 2010–2021 total pembiayaan syariah beserta komponen modal kerja, investasi, dan rumah tangganya berhubungan positif dengan pertumbuhan (Rofik et al., 2025). Sebaliknya, analisis *fixed effect* tingkat provinsi menemukan bahwa pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Afandi & Amin, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian bergantung pada periode, unit analisis, dan sejauh mana estimasi mampu memisahkan pengaruh pembiayaan dari faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan.

Sebagian besar studi tingkat provinsi berakhir sebelum atau selama pandemi COVID-19, dan hanya sedikit yang memperhitungkan guncangan makroekonomi bersama yang memengaruhi seluruh provinsi secara serentak. Hal ini penting untuk periode 2021–2025, yang didominasi oleh pemulihan dari kontraksi tahun 2020, jika pembiayaan meningkat setiap tahun sementara pertumbuhan pulih di semua wilayah, regresi panel sederhana dapat keliru mengaitkan pemulihan tersebut dengan pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan BUS dan UUS terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama 2021–2025, dengan menguji hipotesis (H1) bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi penelitian ini adalah penggunaan data provinsi terbaru, pemilihan estimator panel secara formal, dan pengujian apakah hasilnya tetap bertahan setelah

dikendalikan untuk guncangan waktu bersama dan ukuran pembiayaan alternatif.

METODE

Penelitian kuantitatif eksplanatori ini menggunakan data panel sekunder provinsi-provinsi di Indonesia selama 2021–2025. Pertumbuhan ekonomi (PE) adalah laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010, dalam persen, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2026). Pembiayaan bank syariah (PB) adalah total pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS di setiap provinsi, dalam miliar rupiah, yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Dari 34 provinsi, Kalimantan Utara dikeluarkan karena pembiayaannya tercatat nol pada 2021–2024, yang menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut dilaporkan di bawah provinsi lain dan membuat logaritmanya tidak terdefinisi. Dengan demikian, panel seimbang akhir mencakup 33 provinsi dan 165 observasi. Karena distribusi pembiayaan sangat menceng, variabel ini dimasukkan ke dalam model dalam bentuk logaritma natural, seperti ditunjukkan pada persamaan (1):

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PB_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dengan i menunjukkan provinsi, t tahun, μ_i karakteristik provinsi yang tidak teramati, dan ε_{it} *error term*. Koefisien β_1 mengukur perubahan pertumbuhan, dalam poin persentase, yang berkaitan dengan perubahan satu unit log pembiayaan; dengan demikian, kenaikan pembiayaan sebesar 10 persen berkaitan dengan perubahan pertumbuhan sekitar $0{,}1\beta_1$ poin persentase.

Ketahanan hasil diuji dengan menambahkan efek tahun untuk menyerap guncangan yang dialami semua provinsi, mengeluarkan provinsi dengan pertumbuhan ekstrem yang didorong oleh pertambangan, menggunakan lag pembiayaan satu tahun, dan mengganti tingkat pembiayaan dengan laju pertumbuhan tahunannya. Perhitungan dilakukan dengan Python.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif. Pertumbuhan provinsi rata-rata sebesar 5,42 persen (median 4,91 persen), berkisar dari −2,46 persen di Bali pada 2021 hingga 34,17 persen di Maluku Utara pada 2025. Rata-rata antarprovinsi naik dari 4,23 persen pada 2021 menjadi 5,78 persen pada 2022 dan 6,03 persen pada 2025, mencerminkan pemulihan dari kontraksi tahun 2020. Pembiayaan bank syariah rata-rata sebesar Rp16.726 miliar per provinsi, tetapi sangat timpang, dari Rp128 miliar di Papua Barat pada 2021 hingga Rp243.524 miliar di DKI Jakarta pada 2025. Enam provinsi di Pulau Jawa menyumbang 63,0 persen dari total pembiayaan tahun 2025. Hampir seluruh variasi log pembiayaan terjadi antarprovinsi (SD 1,62), bukan di dalam provinsi dari waktu ke waktu (SD 0,27).

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, 2021–2025

Variabel	Satuan	*n*	Rata-rata	SD total	SD antar	SD dalam	Min.	Maks.
Pertumbuhan ekonomi (PE)	Persen	165	5,42	3,91	3,27	2,20	−2,46	34,17
Pembiayaan bank syariah (PB)	Miliar rupiah	165	16.726	37.505	37.455	6.163	128	243.524
ln PB	Log	165	8,50	1,62	1,62	0,27	4,85	12,40

Sumber: BPS dan OJK, diolah penulis. Tidak termasuk Kalimantan Utara. SD = simpangan baku; antar = antarprovinsi; dalam = dalam provinsi.

Estimasi dan Pemilihan Model

Tabel 2 menyajikan hasil ketiga estimasi. Pada CEM, log pembiayaan memiliki koefisien negatif dan signifikan, karena secara antarprovinsi, provinsi dengan pembiayaan syariah yang kecil, seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, justru tumbuh paling cepat; korelasi antara rata-rata log pembiayaan dan rata-rata pertumbuhan sebesar −0,23. Koefisien REM mendekati nol dan tidak signifikan. Pada FEM, yang hanya menggunakan perubahan di dalam setiap provinsi, koefisiennya menjadi positif dan signifikan pada taraf 5 persen.

Tabel 2 Estimasi Regresi Panel Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	CEM	FEM	REM
Konstanta	8,912*** (1,612)	−6,941	6,008** (2,780)
ln PB	−0,411** (0,186)	1,454** (0,694)	−0,069 (0,320)
Nilai p ln PB	0,029	0,038	0,829
SE cluster-robust ln PB	–	0,783 (p = 0,073)	–
R^2	0,029	0,032 (within); 0,693 (LSDV)	0,029
Observasi	165	165	165

Sumber: BPS dan OJK, diolah penulis. *Standard error* dalam tanda kurung. *** p < 0,01; ** p < 0,05.

Tabel 3 menunjukkan bahwa uji Chow menolak CEM dan memilih FEM, serta uji Hausman menolak REM dan memilih FEM; uji Lagrange Multiplier juga mengonfirmasi adanya efek provinsi yang signifikan. Dengan demikian, FEM merupakan model terpilih.

Tabel 3 Uji Pemilihan Model Panel

Uji	Perbandingan	Statistik	Nilai p	Model terpilih
Chow	CEM vs FEM	$F(32, 131) = 8,873$	< 0,001	FEM
Hausman	REM vs FEM	$\chi^2(1) = 6,119$	0,013	FEM
Lagrange Multiplier	CEM vs REM	$\chi^2(1) = 112,401$	< 0,001	REM

Sumber: BPS dan OJK, diolah penulis.

Uji Diagnostik dan Pengujian Hipotesis

Residual FEM tidak berdistribusi normal (Jarque–Bera = 2.390,9; p < 0,001), terutama karena pertumbuhan ekstrem di beberapa provinsi pertambangan, dan bersifat sangat heteroskedastis antarprovinsi (Wald termodifikasi p < 0,001). Tidak terdapat bukti korelasi serial (Wooldridge F(1, 32) = 0,148; p = 0,703), tetapi terdapat dependensi lintas wilayah yang kuat (Pesaran CD = 11,92; p < 0,001), yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi terkena guncangan bersama. Dengan *standard error* yang diklaster menurut provinsi, koefisien log pembiayaan pada FEM tidak lagi signifikan pada taraf 5 persen (1,454; SE = 0,783; p = 0,073). Pembiayaan juga hanya menjelaskan sebagian kecil variasi pertumbuhan di dalam provinsi (R^2 *within* = 0,032).

Uji Ketahanan Hasil

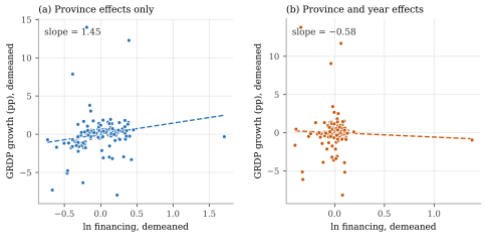
Tabel 4 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa koefisien FEM yang positif tidak bertahan setelah dikendalikan untuk guncangan bersama. Ketika efek tahun ditambahkan, koefisiennya menjadi negatif dan tidak signifikan (−0,579; p = 0,261). Mengeluarkan Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat, yang pertumbuhannya didominasi pertambangan, membuat koefisien FEM satu arah lebih besar dan lebih signifikan (2,093), tetapi koefisien tersebut kembali hilang dengan efek tahun (−0,116; p =

0,926). Pembiayaan dengan lag tidak berpengaruh signifikan pada kedua spesifikasi. Ketika pembiayaan diukur dengan laju pertumbuhan tahunannya, koefisiennya sedikit negatif: ekspansi pembiayaan yang lebih cepat 10 poin persentase berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih rendah sekitar 0,1 poin persentase, besaran yang secara ekonomi dapat diabaikan dan hanya signifikan dengan *standard error* terklaster.

Tabel 4 Uji Ketahanan Hasil

Spesifikasi	Koefisien	SE cluster-robust	Nilai p	*n*
FEM dasar, ln PB	1,454	0,783	0,073	165
FEM dua arah (efek provinsi dan tahun), ln PB	−0,579	0,506	0,261	165
FEM tanpa Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat	2,093	0,437	< 0,001	145
FEM dua arah tanpa empat provinsi yang sama	−0,116	1,239	0,926	145
FEM, ln PB dengan lag satu tahun	0,436	0,918	0,638	132
FEM dua arah, ln PB dengan lag satu tahun	0,320	2,587	0,902	132
FEM, pertumbuhan pembiayaan (%)	−0,012	0,004	0,004	132
FEM dua arah, pertumbuhan pembiayaan (%)	−0,015	0,005	0,006	132

Sumber: BPS dan OJK, diolah penulis. *Standard error* diklaster menurut provinsi. Spesifikasi dengan lag dan tingkat pertumbuhan menggunakan periode 2022–2025.



Gambar 1 Hubungan dalam Provinsi antara Log Pembiayaan Bank Syariah dan Pertumbuhan PDRB, 2021–2025

Keterangan: (a) setelah rata-rata provinsi dihilangkan; (b) setelah rata-rata provinsi dan rata-rata tahun dihilangkan. Titik yang terpisah di sebelah kanan adalah Papua Barat tahun 2025, ketika pembiayaan tercatat melonjak dari Rp206 miliar menjadi Rp1.376 miliar.

Gambar 1 menggambarkan mekanismenya. Dengan efek provinsi saja (panel a), observasi tahun 2021, ketika pembiayaan paling rendah dan pertumbuhan masih tertekan, menarik garis regresi ke atas. Setelah rata-rata pertumbuhan setiap tahun dihilangkan (panel b), sisa variasi pembiayaan tidak berhubungan dengan pertumbuhan. Dengan demikian, H1 ditolak: selama 2021–2025, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa pembiayaan bank syariah meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

Pembahasan

Temuan bahwa pembiayaan bank syariah tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan provinsi sejalan dengan bukti tingkat provinsi dari Afandi dan Amin (2019) dan berbeda dari hubungan positif yang dilaporkan oleh Rofik et al. (2025) untuk periode 2010–2021 dan oleh Zahirah et al. (2025) pada tingkat nasional. Perbandingan antarspesifikasi membantu menjelaskan perbedaan ini. Model *fixed effect* tanpa efek waktu menghasilkan koefisien yang positif dan signifikan, tetapi dependensi lintas wilayah yang kuat menunjukkan bahwa estimasi ini menangkap pemulihan pascapandemi yang dialami bersama: pembiayaan meningkat di hampir setiap provinsi setiap tahun, sementara pertumbuhan pulih di semua wilayah dari tingkatnya pada 2021. Setelah pola bersama ini dihilangkan, variasi pembiayaan yang khas bagi setiap provinsi tidak berhubungan dengan pertumbuhannya.

Beberapa karakteristik perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan hasil ini. Pertama, pembiayaan terkonsentrasi di Jawa, khususnya DKI Jakarta, tempat sebagian pembiayaan mungkin dibukukan di kantor pusat bank alih-alih di lokasi penggunaan dana, sehingga distribusi provinsi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan lokasi kegiatan produktif. Kedua, porsi yang cukup besar dari pembiayaan bank syariah digunakan untuk konsumsi rumah tangga, termasuk perumahan, yang mendukung permintaan tetapi menambah kapasitas produktif lebih sedikit dibandingkan pembiayaan modal kerja dan investasi. Ketiga, perbankan syariah masih kecil dibandingkan perekonomian regional di sebagian besar provinsi di luar Jawa, sehingga kemampuannya untuk menggerakkan output agregat terbatas, sejalan dengan pandangan bahwa sektor keuangan hanya mendukung pertumbuhan ketika menjangkau penggunaan produktif (Levine, 1997; Arcand et al., 2015).

Hubungan negatif antarprovinsi juga patut dicermati. Provinsi dengan pertumbuhan tercepat selama periode ini, seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, sebagian besar memperolehnya dari pertambangan dan pengolahan nikel, yang dibiayai oleh investor korporasi besar dan investor asing, bukan oleh bank syariah. Di provinsi-provinsi ini, pertumbuhan didorong oleh sektor yang sebagian besar berada di luar ekosistem industri halal, sehingga memperlemah keterkaitan antara pembiayaan syariah dan output regional.

Terdapat tiga implikasi kebijakan. Pertama, bank syariah perlu meningkatkan porsi pembiayaan modal kerja dan investasi, khususnya bagi produsen halal serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, pembiayaan perlu diperluas di provinsi di luar Jawa, tempat perbankan syariah masih tipis, melalui jaringan kantor cabang, kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah, dan saluran digital. Ketiga, OJK perlu memublikasikan data pembiayaan provinsi menurut lokasi penggunaan dan sektor ekonomi, sehingga kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan regional dapat dipantau dengan lebih akurat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Periode lima tahun tergolong singkat, bertepatan dengan masa pemulihan yang luar biasa, dan menyisakan sedikit variasi pembiayaan di dalam provinsi; data tahun 2025 masih bersifat sementara, dan lonjakan yang tercatat di Papua Barat pada 2025 perlu diverifikasi. Model hanya memuat satu variabel penjelas. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan periode yang lebih panjang, membedakan pembiayaan menurut jenis penggunaan dan sektor, serta mengestimasi pengaruh bersama sertifikasi halal, ekspor halal, dan pembiayaan syariah setelah data provinsi yang konsisten untuk dua variabel pertama tersedia.

SIMPULAN

Penelitian ini tidak menemukan bukti yang kuat bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama 2021–2025. Meskipun uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier memilih model *fixed effect* dengan koefisien log pembiayaan yang positif (1,454), pengaruh tersebut tidak signifikan dengan *standard error cluster-robust* dan hilang setelah efek tahun mengendalikan pemulihan pascapandemi yang dialami bersama. Pembiayaan dengan lag, pertumbuhan pembiayaan, dan pengecualian provinsi yang pertumbuhannya didorong pertambangan menghasilkan kesimpulan yang sama. Dengan demikian, hubungan positif yang ditunjukkan oleh model panel sederhana mencerminkan dinamika pemulihan bersama, bukan pengaruh pembiayaan itu sendiri. Agar perbankan syariah dapat mendukung pertumbuhan dan ekosistem industri halal, pembiayaan harus lebih diarahkan ke penggunaan produktif dan ke provinsi di luar Jawa,

didukung oleh data regional yang lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. A., & Amin, M. (2019). Islamic bank financing and its effects on economic growth: A cross province analysis. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *8*(2), 243–250. https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10977

Arcand, J. L., Berkes, E., & Panizza, U. (2015). Too much finance? *Journal of Economic Growth*, *20*(2), 105–148.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi, 2021–2025* [Data set]. https://www.bps.go.id

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.

Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review of Economic Studies*, *47*(1), 239–253.

Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, *50*(2), 317–372.

Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, *46*(6), 1251–1271.

Imam, P., & Kpodar, K. (2016). Islamic banking: Good for growth? *Economic Modelling*, *59*, 387–401.

King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The Quarterly Journal of Economics*, *108*(3), 717–737.

Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, *35*(2), 688–726.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Statistik perbankan syariah* [Islamic banking statistics]. https://www.ojk.go.id

Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical Economics*, *60*(1), 13–50.

Rofik, M., Boulanouar, Z., Yuli, S. B. C., & Wardani, D. T. K. (2025). Revisiting the impact of Islamic finance on economic growth: A decomposition analysis using Indonesia as a testing ground. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *18*(4), 765–786. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0288

Rousseau, P. L., & Wachtel, P. (2011). What is happening to the impact of financial deepening on economic growth? *Economic Inquiry*, *49*(1), 276–288.

Zahirah, P., Marlinda, M., Muliadi, M., & Hadi, R. (2025). Islamic finance as a catalyst for economic growth: Insights from Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *14*(1), 227–257. https://doi.org/10.22373/share.v14i1.25473